

Judul : Ribuan sekolah rusak akibat bencana Sumatera: perlukan ditetapkan status darurat pendidikan?
Tanggal : Jumat, 05 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Ribuan Sekolah Rusak Akibat Bencana Sumatera Perlukah Ditetapkan Status Darurat Pendidikan?

Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat tidak hanya memporak porandakan ribuan rumah warga, tetapi juga ribuan sekolah. Berdasarkan data sementara dari Kemendikdasmen per Minggu (30/11), sekolah terdampak bencana sebanyak 1.009 sekolah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Provinsi Aceh berjumlah 310, Sumut berjumlah 385, dan Sumbar berjumlah 314. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan pihaknya sudah meluncurkan tim untuk melakukan mitigasi dan pemetaan. Pihaknya memastikan kegiatan belajar-

mengajar bagi para siswa di daerah yang terdampak banjir dapat tetap dapat berjalan.

"Kami sudah melakukan mitigasi dan melakukan pemetaan, tidak hanya Aceh dan Sumatera Utara, tetapi juga di beberapa tempat di Jawa Timur, dan Jawa Tengah," jelas Abdul Mu'ti dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025). Mu'ti menambahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah mendirikan tenda-tenda darurat di beberapa wilayah terdampak. Kementerian juga sudah mengalokasikan dana untuk tanggap darurat tahap pertama sebesar lebih dari Rp4 miliar. Dengan banyaknya sekolah yang

rusak, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendesak agar ditetapkan status darurat pendidikan.

Ia mengatakan kerusakan infrastruktur pendidikan sangat parah, APBD daerah jelas tidak akan mampu menanggungnya sendirian. Namun, tanpa status bencana nasional atau setidaknya pernyataan status darurat pendidikan dari pemerintah pusat, mekanisme pendanaan dan logistik darurat dari pusat sangat minim dan terhambat. "Akibatnya, proses di lapangan jalan di tempat," tegasnya.

Saat ini, sekolah masih terendam atau rusak parah. Banyak bangunan

sekolah masih dipenuhi lumpur, rusak struktural, bahkan hilang karena terbawa arus. Proses pembersihan dan perbaikan awal sangat minim dan mengandalkan swadaya masyarakat serta relawan. "Sudah satu pekan, tapi pembersihan sekolah masih banyak yang dilakukan manual oleh warga dan guru karena belum ada dukungan logistik yang memadai," ujar Ubaid. Situasi ekonomi keluarga yang hancur pasca banjir berpotensi besar memaksa anak-anak putus sekolah karena masalah biaya. Di samping itu, alasan putus sekolah juga karena membangun sekolah rusak berat butuh waktu yang panjang. Hingga kini pemerintah belum mengeluarkan

skema perlindungan sosial khusus untuk mencegah hal ini. "Jika tidak ada intervensi cepat, kita akan menghadapi generasi hilang. Anak-anak bisa terhenti pendidikannya bukan hanya karena banjir, tetapi karena kelambanan negara," tegas Ubaid.

Bagaimana respons DPR atas desakan adanya darurat pendidikan? Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudien memahami adanya desakan tersebut. Ke depan, DPR akan menyampaikan kepada Pemerintah.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Hetifah Sjaifudien dan Ubaid Matraji terkait desakan adanya status darurat pendidikan.

UBAID MATRAJI, Kornas JPPI

Kami Usulkan Segera Tetapkan Status Darurat



“Banyak sekolah tidak mudah dipulihkan, mereka terendam lumpur, roboh, bahkan hanyut terbawa arus. Sementara, ratusan ribu siswa dan guru terdampak banjir tanpa kepastian.”

Anda mendesak agar Pemerintah mengeluarkan status darurat pendidikan. Kenapa?
Banyak sekolah tidak mudah dipulihkan, mereka terendam lumpur, roboh, bahkan hanyut terbawa arus. Sementara, ratusan ribu siswa dan guru terdampak banjir, masih tertinggal, katung tanpa kepastian kapan bisa kembali belajar dengan layak. Karena itu, kami meminta penetapan status bencana nasional dan status darurat pendidikan.

Apakah status darurat pendidikan segera dikeluarkan?
Presiden harus segera menetapkan status Bencana Nasional dan Mendikdasmen mengeluarkan Surat Keputusan Status Darurat Pendidikan di wilayah terdampak. Status ini krusial untuk membuka akses terhadap Dana Kontinjensi (DAK Fisik Darurat), anggaran

mendesak (on-call) K/L, serta memobilisasi logistik dan sumber daya manusia dari pusat secara masif dan terkoordinasi.

Namapaknya darurat pendidikan belum begitu direpson oleh Pemerintah. Dalam waktu dekat apa yang perlu dilakukan?
Percepat penyediaan sekolah darurat. Implementasinya harus dipercepat. Karena keberadaan sekolah darurat di titik-titik bencana dan di tenda-tenda pengungsian masih sangat minim sekali.

Maksud Anda perlu dibentuk sekolah darurat?
Sekolah darurat ini juga harus memastikan soal kelayakan, keamanan, dan dilengkapi fasilitas pendukung (listrik, air bersih, MCK terpisah, PSK) di semua titik pengungsian atau lokasi yang aman.

Pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh terhenti, bahkan dalam situasi bencana. Kelengkapan sektor pendidikan saat ini adalah darurat yang membutuhkan respons luar biasa. Kami mendesak Presiden dan jajaran menteri terkait untuk mengambil keputusan politik yang berani untuk menyelamatkan masa depan anak-anak di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Jangan biarkan mereka menjadi generasi yang hilang akibat bencana dan kelambanan respons.

Apakah harapan Anda ke depannya?
Pemerintah perlu menghitung ulang total kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan secara komprehensif, serta mengalokasikan dana khusus yang memadai. Mekanisme pencairan harus dipercepat dan dipercepat dengan pengowes yang ketat untuk mencegah penyelewengan. ■ REN

HETIFAH SJAIFUDIEN, Ketua Komisi X DPR

Kami Akan Sampaikan Kepada Pemerintah



“Hal ini juga sejalan dengan semangat perlindungan yang diatur di mana pendidikan adalah layanan esensial yang tidak boleh terhenti dalam keadaan apa pun.”

Ada desakan agar Pemerintah menetapkan darurat pendidikan atas musibah di Aceh, Sumut dan Sumbar. Apa respons Anda?
Dalam situasi bencana yang sedang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, saya memahami munculnya desakan agar Pemerintah menetapkan darurat pendidikan.

Meskipun tidak ada regulasi yang secara eksplisit mendefinisikan darurat pendidikan, namun yang dimaksud adalah penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, seperti bencana atau pandemi.

Apakah akan dilakukan Komisi X DPR atas desakan adanya darurat pendidikan?
Kami tentu akan menyampaikan hal ini kepada Pemerintah.

Kapan?
Komisi X baru mengagendakan

Raker dengan Kemendikdasmen terkait hal ini pada Senin 8 Desember mendatang.

Namun, secara prinsip, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana memang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga negara (termasuk hak atas pendidikan) harus dijamin sejak dimulainya tanggap darurat, dimana negara wajib hadir dengan langkah-lah biasa demi memastikan hak belajar.

Dalam konteks pendidikan pun, sudah ada Permendikbud No. 33/2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang menegaskan bahwa ketika terjadi bencana, Pemerintah Pusat, daerah, dan satuan pendidikan tetap memastikan keberlanjutan pembelajaran, memberikan dukungan psikososial, dan lain-lain.

Maksud Anda, tanpa darurat pendidikan, proses pendidikan tetap berjalan?

Tanpa menunggu penetapan status darurat pendidikan pun, sesungguhnya mekanisme operasional untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, sudah tersedia dan harus segera diaktifkan secara penuh di daerah-daerah terdampak.

Bahkan, jika skala kerusakan yang dihadapi sangat luas dan menyebabkan ribuan peserta didik tidak dapat mengakses sekolah dalam waktu yang panjang, saya memandang bahwa penetapan darurat pendidikan bisa menjadi opsi kebijakan.

Misalnya melalui percepatan koordinasi lintas K/L, memperkuat pendanaan rehabilitasi, serta memberikan dukungan bagi langkah-langkah percepatan pemulihan di lapangan.

Hal ini juga sejalan dengan semangat perlindungan yang diatur dalam UU 24/2007, di mana pendidikan adalah layanan esensial yang tidak boleh terhenti dalam keadaan apa pun. ■ REN